

KNPI Bombana Nilai Mentan Amran Sukses Transformasi Teknologi Pertanian

[su_heading style="default" size="13" align="center" margin="20" id="" class=""]KNPI Bombana Nilai Mentan Amran Sukses Transformasi Teknologi Pertanian[/su_heading]

Rumbia, SultraNET. | Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara menilai Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaeman sukses mentransformasi teknologi pertanian di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Agustamin Saleko, Ketua KNPI Bombana kepada awak media SultraNET. (17/9/2019). menurutnya kebijakan Menteri Amran dalam penerapan penggunaan teknologi mesin di sektor pertanian yang gencar dilakukan saat ini terbukti sukses mengangkat derajat petani Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Bombana.

Disamping itu, kebijakan pasca panen Kementan terbukti ampuh menghindarkan para petani dari potensi kerugian akibat permainan harga tengkulak yang kerap melanda dimusim panen.

“Saat ini petani sudah tidak mengkhawatirkan lagi jatuhnya harga dimusim panen, karena pemerintah sudah hadir dengan memberikan standarisasi harga dan jaminan pembelian oleh Bulog langsung,” Tutur Agustamin

Menteri Amran juga dinilai cukup sukses dalam memanfaatkan beragam potensi agraris yang ada di Indonesia, oleh sebab itu dengan corak kepemimpinan Amran Sulaiman seperti saat ini, dinilainya akan menuai optimisme guna menuju terealisasinya Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

” Misalnya di Bombana ini, sangat banyak lahan tidur yang kemudian dibuka menjadi lahan persawahan dan perkebunan untuk masyarakat,

tentu itu sangat membantu petani kita,” Imbuhnya.

Disebutkan, salah satu bukti kesuksesan Amran di Bombana yaitu meningkatnya produktifitas petani setelah mendapat bantuan dan teknologi baru dalam bercocok tanam.

“Sudah seharusnya Presiden Joko Widodo mempertahankan menteri yang energik dan visioner seperti pak Amran ini,” Pungkasnya

(IS)

FORMAT Bombana Siap Adukan PT. AMI ke Menteri Susi

Rumbia, SultraNET. | Forum Advokasi Masyarakat Areal Tambang (FORMAT) Bombana mempersiapkan dokumen untuk mengadukan PT. Artha Mining Industri (AMI) yang beroperasi di Desa Liano, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ke Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia.

Format Bombana bakal mengadukan perusahaan industri pemurnian nikel itu atas dugaan pencemaran laut dan membangun Pelabuhan Khusus (jetty) di areal tangkap ikan nelayan lokal Kabupaten Bombana.

Hal itu disampaikan Muhammad Adnan, Ketua Format Bombana kepada awak media SultraNET., (16/9/2019) menurutnya Pihaknya bakal melaporkan perusahaan yang terdiri dari konsorsium tiga perusahaan tambang itu ke kementerian yang Dipimpin Dr. (HC) Susi Pudjiastuti karena banyaknya aduan yang ia terima dari nelayan Bombana yang mengaku aktifitas perusahaan sudah sangat meresahkan.

“Ini domainnya Kementerian Kelautan juga karena yang terkena

dampak utama adalah nelayan lokal bombana,” urai Adnan

Adnan menguraikan, ia menerima banyak keluhan nelayan lokal yang mengalami penurunan penghasilan yang sangat drastis karena diduga PT. AMI melarang nelayan lokal menangkap ikan di area pembangunan Jetty yang telah menjadi area tangkap ikan nelayan lokal secara turun temurun.

Disamping itu, diduga akibat endapan bekas galian tanah yang terbawa air kelaut menyebabkan air diperairan sekitar perusahaan menjadi keruh.

“Karena sudah keruh airnya maka rumput laut yang menjadi komoditas lain warga dan nelayan lokal menjadi rusak dan produksinya menurun, hal inilah yang penting disampaikan ke Ibu Menteri Susi agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” Pungkasnya (IS)

PT. AMI Beraksi, Nelayan Bombana Terancam Gigit Jari

Rumbia, SultraNET. | Aktivitas pembangunan Pabrik Pemurnian Nikel (smelter) milik PT. Artha Mining Industri (AMI) di Liano, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (sultra) mulai dirasakan dampaknya oleh nelayan setempat.

Pasalnya akibat pengerukan tanah untuk pembangunan pelabuhan khusus (Jetty) milik perusahaan di areal tangkap nelayan Bombana itu, kondisi air berubah menjadi keruh, disamping itu warga yang setiap harinya menggantungkan hidup dengan memancing ikan di areal tangkap yang berada tepat di lokasi pembangunan Jetty PT. AMI, kini harus gigit jari karena mendapat larangan dari Pihak PT. AMI.



Suasana saat mendengarkan keluhan warga pulau Terapung

Haludin (62), salah satu nelayan yang bermukim di Pulau Terapung, Desa Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, saat disambangi awak media SultraNET. (12/9/2019) menuturkan sejak PT. AMI beraktivitas di Desa Liano masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di daerah tersebut mengalami penurunan penghasilan yang sangat drastis.

“Kami nelayan disini pak sejak adanya perusahaan itu semakin susah, bagaimana tidak susah, dulunya kita andalkan memancing di area tangkap yang sekarang perusahaan sudah kuasai dan kita dilarang mendekat disana,” Keluhnya

Bukan itu saja lanjut Haluddin, Masyarakat Pulau Terapung yang selama ini mengandalkan hutan yang posisinya tepat berhadapan dengan pulau yang berpenghuni lebih dari 600 jiwa itu, untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar saat ini harus mengelus dada karena perusahaan lagi lagi tidak membolehkan warga untuk memasuki area mereka.

“Untuk kayu bakar saja pak sekarang kami harus cari lebih jauh lagi, karena di depan (sambil menunjuk area pembangunan Jetty PT. AMI) itu kami sudah dilarang masuk,” Geramnya

Untuk itu melalui media ini, ia sebagai warga pulau meminta agar Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bombana segera melakukan upaya dan kebijakan agar aktivitas perusahaan tidak membawa dampak yang lebih besar lagi bagi masyarakat.

“Kami minta ini perusahaan di evaluasi, kalau perlu ditutup saja karena ini mengancam kehidupan kami sebagai nelayan dan anak cucu kami yang bermukim dipulau ini sejak turun temurun,” Harapnya

Karena penasaran awak media ini bersama beberapa aktivis pegiat lingkungan dan lokal mencoba menyeberang dari pulau menggunakan kapal nelayan menuju area pembangunan Smelter PT. Artha Mining Industry (AMI), yang banyak dikeluhkan warga itu.

Benar saja dari kejauhan sudah nampak aktivitas perusahaan dibibir pantai dengan meratakan gunung yang ada untuk menimbun di area pantai.



Haliq, Aktivist Mataoleo saat menunjukkan Jetty perusahaan yang dibangun di area tangkap nelayan

Ketika kami menyandarkan perahu di tepi pantai, dua orang petugas keamanan datang menghampiri kami dan menyuruh kami meninggalkan area tersebut.

“Kami minta tolong pak, disini area perusahaan kalau mau datang harus melapor dulu pak,” tutur sang Petugas

Acci salah satu aktivis mataoleo yang turut bersama rombongan sempat beradu argumen dengan petugas tersebut, sehingga petugas itu memanggil atasannya untuk menghalau kami keluar dari area itu. sempat terjadi ketegangan karena para petugas melarang kami mengambil gambar di area itu.

“Disini tidak boleh ambil foto pak, tolong hargai kami,” tutur petugas yang diketahui sebagai warga mataoleo itu.

Karena mendapat penolakan, kami tidak bisa masuk ke area perusahaan lebih

kedalam sehingga kami memutuskan untuk melihat lihat di tepai pantai saja dan memeriksa kondisi pelabuhan khusus Jetty yang banyak dikeluhkan karena dibangun diarea tangkap nelayan dan diduga menjadi penyebab pantai menjadi keruh.

Hingga berita ini dirilis, Pihak PT. AMI yang kami mintai tanggapannya melalui sambungan telpon dan pesan Whattshap belum memberikan jawaban. (IS)

Dikritik “Perbaiki Jalan Bagus”, Begini Penjelasan Dinas PUPR Bombana

Rumbia, SultraNET. | **Proyek peningkatan jalan Ibu Kota Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, berupa pengerjaan bahu jalan dan perbaikan di beberapa ruas mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat, bahkan menjadi perbincangan yang hangat di media sosial.**

Pekerjaan tersebut mendapat kritikan karena dinilai sebagai pemborosan anggaran. Masyarakat menilai ruas jalan yang ditingkatkan itu masih sangat layak digunakan sehingga kurang tepat jika dilakukan pengerjaan sedangkan banyak ruas jalan lain yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan yang juga berada di Ibu Kota Rumbia.

Menanggapi banyaknya kritikan dan masukan dari masyarakat, Samuel Kadmaerubun selaku Kapala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana, Kamis (12/9/2019) menuturkan Pihaknya pada dasarnya menyambut baik dan mengapresiasi banyaknya masukan dan kritikan dari masyarakat.

Menurut pria yang akrab disapa Sem itu, kritikan dan masukan sangat membantu pihaknya untuk memastikan pekerjaan yang sedang dilakukan dapat berjalan dikoridor yang benar dan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.

” Kritikan dan masukan dari masyarakat itu harus disikapi secara bijak karena itu tujuannya untuk kemajuan daerah dan kita tidak boleh alergi justru tugas kita untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat,” ujar Semuel.

Terlebih lagi lanjut Sem, kritikan itu muncul karena dari keseluruhan ruas jalan dalam ibukota yang akan dibenahi itu, secara kebetulan pihak rekanan terlebih dahulu memulai pekerjaannya di Jalan Jendral Sudirman yang kondisinya masih jauh lebih baik dari kondisi di ruas jalan lainnya.

” Jadi yang dibenahi itu sebenarnya bukan hanya yang di jenderal sudirman saja, tetapi kita akan benahi semua ruas dan bahu jalan dalam Ibukota ini yang kondisi sudah layak dikerjakan,” Bebernya

Untuk tahun ini, peningkatan jalan berupa perbaikan ruas jalan rusak dan peningkatan bahu jalan dalam ibu kota bombana yang bakal dikerjakan yaitu di ruas Jalan Jenderal Sudirman senilai 2.08 miliar, Jalan Ki Hajar Dewantoro dan Jalan Wolter Monginsidi senilai 2.07 miliar dan Jalan Tina Orima dan Jalan Ahmad Yani senilai 1.57 miliar rupiah.

” Namun baru rekanan di Jalan Jenderal Sudirman yang sudah mulai bekerja dan bagi rekanan lain yang belum memulai pekerjaan, saya akan berikan teguran pada mereka,” Sebutnya

Kendati demikian, Sem yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek yang digadang gadang dapat mempercantik wajah Ibu kota itu, menampik dugaan dilakukan pemborosan anggaran, menurutnya pengerjaan bahu jalan itu merupakan peningkatan terhadap pekerjaan yang dilakukan tahun 2014 lalu yang kondisinya hari ini sudah mengalami kerusakan dibeberapa titik.

” Bahu jalan yang ditingkatkan ini, dikerjakan tahun 2014 lalu dan dibuat hanya sebagai penyangga sisi kiri dan kanan dari jalan utama, dan kualitasnya pun rendah dibanding jalan utama yang memakai aspal

hot mix, ini yang kita tingkatkan agar kualitasnya sama antara jalan yang ditengah dan bahu jalan,” Urainya

Mantan Kasubag. Perencanaan Dinas PUPR itu menyebut rencana perbaikan itu sebenarnya sudah diusulkan sejak tahun 2017 lalu karena di beberapa sisi dan ruas jalan sudah mengalami penurunan struktur dan menjadi genangan air bila musim penghujan tiba.

***“Ini sudah diusulkan sejak beberapa tahun lalu dan baru dapat direalisasikan, nantinya dibahujan ini akan dibuatkan saluran pembuangan ke parit agar menghindari genangan air jika musim penghujan tiba dan memang ini berbeda dengan bahu jalan yang lalu,”
Bebernya***

Untuk tahun anggaran 2019 ini tambah Sem, anggaran yang di plot rehab dan peningkatan jalan Kabupaten Bombana untuk wilayah Kabaena mendapat anggaran sebesar 12 Miliar rupiah yang diporsikan untuk Jalan menuju Desa Wisata Tangkeno hingga Kabaena Tengah, sementara Rumbia Ibukota Kabupaten Bombana dikucurkan sebesar 5,7 Miliar rupiah dan wilayah Poleang sebesar 1,2 Miliar rupiah untuk perbaikan jalan di Poleang Utara dan Sekitarnya

“Jadi semua wilayah pada dasarnya diberikan dan terbanyak untuk wilayah Kabaena.” Tutupnya (IS)



PDAM Bombana Diskon 85 Persen Biaya Pemasangan Baru

Sambungan Air di Tiga Kecamatan

Rumbia, SultraNET. | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bombana memberikan pemotongan biaya (diskon) sebesar 85 persen untuk pemasangan baru sambungan air kepada pelanggan di tiga Kecamatan, yang meliputi Kecamatan Rarowatu, Tontonunu dan Mataoleo.

Direktur PDAM Bombana, DR. Arman kepada awak media ini, rabu (11/9/2019) menyampaikan bahwa pemberian diskon untuk pemasangan baru sambungan air itu, berlaku hingga akhir bulan oktober 2019 mendatang.

“Kami harap agar masyarakat di tiga kecamatan itu bisa memanfaatkan adanya pengurangan biaya ini, karena waktu berlakunya memang juga terbatas,” Tutur Mantan Aktifis Mahasiswa Muhammadiyah itu

Dipilihnya tiga kecamatan tersebut lanjut Arman karena ketersediaan dan debit air yang dapat disediakan oleh PDAM ke masyarakat dimusim kemarau ini masih melebihi dari kebutuhan.

“Untuk kecamatan lain, kita terus upayakan agar ketersediaan air juga dapat melebihi. sehingga program ini juga bisa diterapkan di daerah itu,” Sebutnya

Pria yang juga menjabat Kepala Bidang penanganan Konflik dan kewaspadaan nasional, Badan Kesbangpol Bombana itu merinci Adapun besaran biaya pemasangan baru setelah dilakukan pengurangan adalah sebesar 76.000 rupiah untuk kelompok pengguna I yaitu Fasilitas Umum dan Rumah Ibadah, sedangkan untuk kelompok II yaitu pengguna rumah non permanen dikenakan biaya sebesar 79.600 rupiah sedangkan untuk kelompok III yaitu pengguna dengan rumah permanen dikenakan biaya sebesar 87.640 rupiah.

Pemasangan baru itu, tambahanya PDAM menanggung bahan hingga 8 meter dari pipa penyambungan dengan asumsi 2 batang pipa sepanjang masing-masing empat meter, 1 buah aktaf kran dan 1 buah water kran.

“Jika kebutuhan pelanggan melebihi dari yang disiapkan PDAM maka

biayanya itu ditanggung pelanggan,” Pungkasnya (IS)

Setujui KUA-PPAS, DPRD Harap Kecamatan Batuatas Dapat Perhatian

Batauga, SultraNET. | Kabar gembira untuk Masyarakat Kecamatan Batuatas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan (Busel) memberi Perhatian terhadap Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang kegiatan perekonomian Masyarakat setempat.

Hal itu disampaikan Anggota Badan Anggaran DPRD Busel, L.M. Amal, A,Md saat menyampaikan Laporan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. yang digelar di Gedung Lamaindo, Selasa (3/9/2019).

Dalam Lapornya, Anggota Dewan yang berasal dari Daerah Pemilihan Kecamatan Sampolawa itu menyampaikan langsung kepada Plt. Bupati Busel terkait kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang telah disepakati pada Tahun 2018 lalu terkait dengan rencana Pembangunan Jalan yang menghubungkan antar Desa se Kecamatan Batuatas yang seharusnya dilaksanakan pada Tahun 2019 namun hingga saat ini kesepakatan untuk membangun infrastruktur jalan dan Pengadaan Air Bersih di daerah perbatasan tersebut belum terealisasi sehingga pihak DPRD meminta agar Tahun Anggaran 2020 rencana tersebut dapat direalisasikan.

“Kami berharap agar rencana Pembangunan Jalan yang menghubungkan antar Desa se Kecamatan Batuatas dan Pengadaan Air Bersih di daerah perbatasan tersebut dapat direalisasikan pada Tahun

Anggaran 2020,” Tutar Amal

Selain meminta pemerintah Daerah untuk memberi perhatian serius atas pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan yang masuk sebagai Daerah terluar dalam wilayah kabupaten Buton selatan itu, Pihak DPRD juga mengeluarkan beberapa rekomendasi dan catatan sebagai kesimpulan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap Persetujuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Adapun catatan dan rekomendasi itu adalah Pertama, diharapkan KUA PPAS Perubahan APBD 2019 harus menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam pencapaian Visi dan misi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah yang di tetapkan sebagai kerangka acuan Pemerintah Daerah selama masa lima Tahun,

Serta dapat menunjang pelaksanaan pembangunan dan menyelesaikan beberapa persoalan Daerah di Kabupaten Buton Selatan, seperti Penyertaan Modal terhadap PDAM perlu dilakukan kajian agar alokasi anggaran dapat mencapai sasaran.

Kedua, Peningkatan kapasitas SDM dan penyelesaian pemilik lahan perkantoran, ketiga diharapkan agar KUA -PPAS diformulasikan sebagai langkah untuk menyesuaikan dalam perubahan asumsi kebijakan Penyusunan APBD.

Keempat, meminta kepada Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi dan pajak Daerah.

Kelima Dewan meminta pemerintah daerah agar melakukan terobosan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Buton Selatan,

Keenam, mengapresiasi adanya perencanaan Pembangunan 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2019 (AM)

Genjot Wisatawan, Pemkab Bombana Gelar Festival di Kabaena

Rumbia, SultraNET. | Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana kembali menggelar Festival Sadar Budaya, dengan mengadakan berbagai jenis perlombaan yang terdiri dari Lomba seni dan budaya serta perlombaan perahu hias.

Ada yang berbeda dari pagelaran festival kali ini, jika ditahun sebelumnya Festival hanya dipusatkan di Desa Wisata Tangkeno, namun tahun ini bakal digelar di Dua Desa yang berbeda.

Untuk kegiatan Festival Seni dan Budaya tetap digelar di Desa Wisata Tangkeno, Kecamatan Kabaena Tengah. sedangkan untuk kegiatan yang dipusatkan di Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur, bakal digelar Festival Kuliner dan Lomba Perahu Hias.

Kepada awak Media SultraNET. Selasa (3/9/2019), Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana, Janariah, S.Sos., M.Si mengungkapkan sesuai rencana festival tersebut bakal dimulai pada tanggal 14 hingga 19 September 2019 ini.

Nantinya pada festival tersebut bakal menampilkan berbagi jenis seni dan budaya asli Daerah Kabupaten Bombana, seperti tari, lulo, cerita rakyat dan juga lomba perahu hias serta festival kuliner serba ikan

*“Kalau di Desa Tangkeno di agendakan perlombaan seni budaya, sedangkan lomba perahu hias ini akan di tempatkan di Desa Tapuhaka,”
Tutur Janariah*

Menurutnya Festival Sadar Budaya ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Pemkab Bombana disetiap tahunnya, dengan tujuan untuk terpeliharanya karifan lokal di wilayah penghasil emas itu.

“Insya Allah kegiatan ini akan dibuka langsung oleh Bupati Bombana,”

ungkapnya.

Selain itu lanjut Janariah, festival ini juga bertujuan untuk menggenjot sektor pariwisata yang ada di Pulau Kabaena, agar menarik wisatawan luar maupun wisatawan lokal

“Kegiatan seni, budaya dan perlombaan perahu hias di festival ini dilakukan sebagai ajang mempromosikan wisata Bahari dan wisata lainnya yang ada di Kabaena,” Imbuhnya

Sedangkan untuk festival kuliner serba ikan sendiri, merupakan upaya untuk mendorong kelompok sadar budaya yang ada di Pulau Kabaena, khususnya para ibu-ibu untuk lebih memiliki wawasan dalam mengolah ikan menjadi berbagai jenis makanan. Seperti sup ikan, bakso ikan dan jenis makanan lainnya yang terbuat dari ikan.

“Apalagi di sana sumber ikan yang masih segar, akan lebih higienis dijadikan makanan. Festival serba ikan juga bukan hanya digelar di daerah saja, bahkan ditingkatkan nasional,” Tutupnya (Fendi)

Peringati Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1441 H, Pemkab Buton Selatan Gelar Dzikir Akbar

Batauga, SultraNET. | Memperingati Tahun Baru Hijriah, 1 Muharam 1441 H/2019 M, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar Dzikir Akbar bertempat di Masjid Nurul Fitri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (02/09/2019.)

Dalam sambutannya, Sekertaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Drs.La Siambo

mewakili Plt. Bupati Buton Selatan mengatakan sebagai Hamba Allah SWT dan sekaligus sebagai makhluk sosial maka selayaknya kita bersama selalu bermuhassabah guna meraih kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Pergantian Tahun Hijriah merupakan momentum bersama untuk mengintrospeksi diri dan melakukan transformasi serta memelihara kondisi yang lebih baik.

***“Sebagai ummat Islam seharusnya mampu meneladani konteks hijrah Rasulullah SAW yang bukan hanya perpindahan dari kota Mekkah ke Madinah, namun lebih dari itu, kita diharapkan mampu mentransformasikan diri kita kearah yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri dan masyarakat dibandingkan dengan tahun sebelumnya,”
Tutur La Siambo***

Sebelum mengakhiri sambutannya, La Siambo mengucapkan Selamat Tahun Baru Hijriah 1441 H/2019 kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Buton Selatan dengan harapan semoga Allah swt senantiasa membimbing ke jalan yang benar.

***“Atas nama Plt. Bupati Buton Selatan dan keluarga menyampaikan selamat Tahun Baru Hijriah 1441 Hijriah atau Tahun 2019 Masehi kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Buton Selatan. Dengan harapan semoga Allah swt senantiasa membimbing ke jalan yang benar,”
Tutupnya***

Ditempat sama, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buton Selatan, Insanu, SKM, M, Si kepada media harapan Sultra ketika ditemui tadi usai acara Dzikir Akbar menuturkan, kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekertaris Daerah, unsur Pimpinan DPRD, serta seluruh Pimpinan dan Staf Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Buton Selatan.

Mantan Kepala Puskesmas Toari, Kabupaten Kolaka ini menambahkan bahwa Peringatan Tahun Baru Tahun ini juga dihadiri oleh para anggota Majelis Taklim se Kecamatan Batauga, Para Alim Ulama dan undangan lainnya dengan perkiraan jamaah yang hadir lebih dari 400 orang.

” Selain dihadiri oleh Sekertaris Daerah, Unsur Pimpinan DPRD dan Semua Organisasi perangkat Daerah, turut hadir pula Majelis Taklim se Kecamatan Batauga, Para Alim Ulama dan undangan lainnya dengan

perkiraan yang hadir kurang lebih 400 orang .” Singkatnya (Abady)

Didaulat Sampaikan Pandangan Umum Fraksi di DPRD, Andi Nirwana Tafdil Apresiasi Kinerja OPD Kabupaten Bombana

Rumbia, SultraNET. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, menggelar rapat Paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, Senin 02 September 2019.

Rapat yang di pimpin berlangsung oleh Ketua DPRD, Kabupaten bombana Andi Firman itu, dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bombana, H Tafdil dan Johan Salim, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Andi Nirwana Sebbu yang didaulat menyampaikan pandangannya menyampaikan bahwa Pemkab Bombana dianggap telah menyusun serta merinci dengan baik pengelolaan APBD tahun ini mulai dari sisi pendapatan daerah, belanja langsung maupun tidak langsung secara transparan.

“Kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemkab, khususnya seluruh perangkat pemerintah yang telah bekerja maksimal demi terwujudnya cita-cita peningkatan kesejahteraan masyarakat bombana,” ungkapanya.

Lebih lanjut, Andi Nirwana, menguraikan bahwa pendapatan asli daerah (PAD),

Dana perimbangan mengalami penurunan, namun pendapatan daerah mengalami kenaikan, sehingga Penyusunan dan Perincian penggunaan anggaran dilakukan secara transparan baik itu pendapatan serta belanja daerah secara menyeluruhan.

Senator DPD -RI terpilih pemilu 2019 ini berharap agar seluruh kegiatan yang telah dianggarkan dalam Raperda (APBD) tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu, mengingat akhir tahun 2019 tinggal beberapa bulan lagi.

“Pemerintah harus lebih mengutamakan kegiatan dan program pro rakyat yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, kami juga berharap pemerintah dapat memaksimalkan serapan perubahan APBD tahun ini, sehingga program-program yang ada didalamnya dapat secara optimal dirasakan dan dimanfaatkan masyarakat bombana,” Ucapnya.

Meski begitu lanjutnya, pada dasarnya Fraksi PAN Bersatu menerima pengajuan Raperda APBD perubahan tahun 2019 Pemkab Bombana, untuk dibahas sesuai dengan tingkatannya.

Pengajuan Raperda APBD perubahan tidak hanya di setuju dari fraksi PAN namun fraksi dari partai lain juga mendukung pemerintah untuk Segera di bahas di DPRD Kabupaten Bombana Tahun ini. (Fendi)

Pemkab Busel Dukung Penuh Pelaksanaan Kegiatan TMMD ke 106

Rumbia, SultraNET. | Untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 106 Tahun Anggaran 2019 yang didipusatkan di Kelurahan Masiri dan Kelurahan Majapahit Kecamatan

Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar Rapat bersama dengan KODIM 1413 Buton, bertempat digedung Lamaindo, Kamis (29/8/2019).

Rapat dengan agenda pemantapan kesiapan pelaksanaan TMMD itu dibuka langsung oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Drs. La Siambo dan dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Komandan Kodim 1413 Buton, Letnan Kolonel Arif Kurniawan, SE, M.IPol dalam paparannya menjelaskan bahwa salah satu tugas Kodim 1413 Buton adalah membantu Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan Daerah melalui kegiatan TMMD dan dilaksanakan secara terpadu bersama Masyarakat dan instansi terkait.

” Adapun tujuan kegiatan kita hari ini, agar dalam pencapaian tujuan akhir dapat berjalan aman, tertib dan lancar serta berhasil dengan baik. adapun personil yang akan dilibatkan sejumlah 150 orang terdiri dari utusan Kodam, Korem dan Kodim ” Papar mantan Komandan Detasemen Markas DIDIV-2 Kostrad Malang ini

Ditempat yang sama, Sekertaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Menyampaikan terimakasih atas nama pemerintah kepada Kodim 1413 Buton atas ditetapkannya Buton Selatan sebagai Lokasi TMMD Tahun 2019, untuk itu Jenderal Aparatur Sipil Negara itu mengharapkan keterpaduan antara Kodim dengan OPD agar kegiatan itu dapat mencapai hasil optimal.

” Atas nama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menyampaikan Terimakasih kepada Jajaran Kodim 1413 Buton yang telah menempatkan Kabupaten Buton Selatan sebagai Lokasi kegiatan TNMD, saya harapkan sinergitas antara Kodim dan OPD agar hasil kegiatan ini dapat maksimal.” ungkapnya

Untuk mensukseskan kegiatan TMMD dimaksud, hasil rapat tersebut mengagendakan peninjauan lokasi kegiatan pada sabtu, (31/8/2019) besok.
(Abady)